

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DISKOMINFO

Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (BPKP, 2000). Sementara menurut Lohman (2003), indikator kinerja (performance indicators) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Indikator kinerja dalam sebuah organisasi merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan entitas organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Pada umumnya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Indikator kinerja yang didukung oleh suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data yang kinerja yang memadai, akan dapat memberikan arah organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Indikator kinerja sebenarnya tidak hanya dapat digunakan pada saat penyusunan laporan pertanggungjawaban saja, namun indikator kinerja juga dapat menjadi komponen yang sangat penting pada saat perencanaan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
		2018	2019		2020	2021	2022	2023	
1.	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE (Bobot 17%).	3,12	3,41		2,94	3,41	3,53	3,65	3,65
2.	Indeks Domain Tata Kelola SPBE (Bobot 28%).	3,43	3,57		2,51	3,71	3,83	3,95	3,95
3.	Indeks Domain Layanan SPBE (Bobot 55%).	4,06	4,18		3,20	4,06	4,17	4,30	4,30
4.	Laju Pemanfaatan Data Sektoral.	8,21%	15,18%		30,36%	63,72%	81,76%	95,65%	95,65%
5.	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI).	1	1		1	2+	3	3	3

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
		2018	2019		2020	2021	2022	2023	
1.	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.	15%	20%		40%	60%	70%	80%	80%
2.	Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi.	35%	45%		55%	65%	75%	85%	85%
3.	Nilai survey kepuasan komunikasi publik.	-	60%		64%	71%	78%	85%	85%
4.	Persentase ketersediaan data sektoral.	64%	74%		79%	89%	95%	100%	100%
5.	Persentase Badan Publik yang terbuka.	55%	68%		76%	84%	92%	100%	100%
6.	Persentase PD memiliki Keamanan Informasi >80.	-	16,67%		33,33%	50,00%	66,67%	83,33%	83,33%
7.	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang tercapai.	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah yang tercapai.	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%

Catatan:

1. Pada indikator program Nilai Survey Kepuasan Publik tahun 2018 belum ada nilai dikarenakan pada tahun tersebut belum dilakukan survey kepuasan. Survey akan dilakukan mulai dari tahun 2019.
2. Pada indikator program Persentase PD memiliki Keamanan Informasi >80 tahun 2018 belum ada angka persentase pada tahun tersebut dikarenakan belum memiliki pedoman assessment standar keamanan informasi. Penyusunan pedoman dilakukan pada tahun 2019.